

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo dan Andalus, Mutia Kartika, 2022, *Pemindahan Ibu Kota Negara: Urgensi, Kewenangan, dan Isu-Isu Sosial-Politik—Ibu Kota Negara Baru dan Masa Depan Republik*, PT Tubagus Lima Korporat, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM)*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Depok.
- Atmadja, I Dewa Gede 2012, *Ilmu Negara-Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang.
- _____, dan Budhiarta, I Nyoman Putu, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Atok, A. Rasyid Al, 2015, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan – Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*, Setara Press, Malang.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- C. Anwar, 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Intrans Publishing, Malang.
- Chairul Huda, Muhammad, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang.
- Efriza, 2014, *Studi Parlemen-Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Fadhallah, R. A., 2020, *Wawancara*, UNJ Press, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2009, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harefa, Darmawan dan Hulu, Fatolosa, 2020, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*, PM Publisher, Banyumas.
- Hennink, Monique, Hutter, Inge dan Bailey, Ajay, 2011, *Qualitative Research Methods*, SAGE Publications Ltd, London.
- HR, Ridwan, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2014, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- _____, dan Nazriyah, 2020, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, CV. Hikam Media Utama, Yogyakarta.
- Jurdi, Fajlurrahman, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Moleong, Lexy J., 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Mufti, Muslim dan Naafisah, Didah Durrotun, 2013, *Teori-Teori Demokrasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S., 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red and White Publishing, Indonesia.
- _____, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, EA Books, Sleman.

- Nugroho, Yanuar, *et al.*, 2023, *Nusantara: A Historical Perspective* dalam *The Road to Nusantara*, ISEAS—Yusof Isak Institute, Singapore & National Research and Innovation Agency (Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN), Jakarta.
- Palulungan, Lusua, *et al.*, 2019, *Reses Partisipatif: Menjadikan Reses Lebih Efektif*, Yayasan BaKTI, Makassar.
- Riskiyono, Djoko, 2016, *Pengaruh Partisipasi dan Pengawasan Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta.
- Rofiandri, Ronald, 2020, *Panduan Pengelolaan Reses Anggota DPR yang Transparan dan Akuntabel*, Perkumpulan Indonesia Budget Center (IBC), Jakarta.
- S., Laurensius Arliman, 2019, *Ilmu Perundang-undangan yang Baik untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- S., Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar dan Djafar, Eka Merdekawati, *Hukum Keuangan Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Sarja, 2016, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- Sirajuddin dan Winardi, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Syahrum, Muhammad, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS Publisher, Riau.
- Vieira, Monica Brito, dan Runciman, David, 2008, *Representation*, Politi Press, Cambridge.

Produk dan Dokumen Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 mengenai Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021.

Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-44/Pres/09/2021 tanggal 29 September 2021.

Universal Declaration of Human Rights.

Makalah

Asshiddiqie, Jimly, 2011, "Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat." Makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Artikel Jurnal

Akmal Salim Ruhana, "Demokratisasi Partisipasi Publik dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama," *Dialog*, Vol. 42, No. 2, Desember, 2019.

Anin Dhita Kiky Amrynudin dan Riris Katharina, "Transparansi Anggaran Reses dan Kepercayaan Publik", *Info Singkat Bidang Politik dalam Negeri-Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIII, No.21/I/Puslit/November/2021.

Anita Nuraeni Putri, "Pertanggungjawaban Fungsi Representasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat", *Jurnal Jentera*, Vol. 3, No. 2, Desember, 2020.

Bagus Hermanto, "Dinamika Partisipasi dalam Mewujudkan Legislasi yang Partisipatoris (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dan 91/PUU-XVIII/2020)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 16, No. 2, Agustus, 2023.

Carolyn Abbot, "Losing the Local? Public Participation and Legal Expertise in Planning Law," *Legal Studies*, Vol. 40, Issue 2, June, 2020.

- Despan Heryansyah, “Absennya Partisipasi Publik dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara,” *Prosiding Seminar Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, November, 2024, hlm. 125.
- Epita Eridani dan I Made Dedy Priyanto, “Fungsi Legislasi DPR dalam Pembentukan Undang-Undang”, *Kertha Negara*, Vol. 3, No. 3, September, 2015.
- Erika Sisilia Wenas, Alfon Kimbal dan Neni Kumayas, “Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon”, *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Esty Ekawati, “Dari Representasi Politik Formal ke Representasi Politik Non-Elektoral,” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 11, No. 2, Desember, 2014.
- Dede Mariana, “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, Oktober, 2015.
- Dhine Putri Aulia, Nisa Fitri Ramdani, Yasmin Alfiyah, dan Chisa Belinda Harahap, “Konflik Masyarakat Adat pada Pembangunan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 50, 2025.
- Fahrul Fauzi dan Suparjo Sujadi, “Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara”, *Tunas Agraria*, Vol. 6, No. 3, September, 2023.
- Hamdan Zoelva, “Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita” *Hasanuddin Law Review* 1, No. 2, Agustus 2015.
- Hendro Susanto, Niken Febrina Ernungtyas, Guntur Freddy Prisanto, dan Anindita Lintangdesi Afriani, “Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Kunjungan Kerja: Studi pada Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (SUMUT 1)”, *Jurnal Representamen*, Vol. 7, No. 01, April 2021.
- Henny Andriani, “Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, Issue 1, April, 2023.
- HM. Thalhah, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Melalui Pemikiran Hans Kelsen”, *Jurnal UNISIA*, Vol. 31, No. 69, September, 2008.
- _____, “Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 16, No. 3, Juli, 2009.
- Jacson Rorimpandey, “Tinjauan Yuridis Fungsi DPR RI dalam Pengawasan Pelaksanaan APBN Menurut UU No. 17 Tahun 2004”, *Lex Administratum*, Vol. IV, No. 1, Januari, 2016.
- M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa dan Ade Kosasih, “Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1, Maret, 2022.
- M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juni, 2013.
- Martitah, Arif Hidayat, Rahayu Fery Anitasari, Malik Akbar Mulki Rahman, Triska Rahmatul Aini, “Transformation of the Legislative System in Indonesia

Based on the Principles of Good Legislation”, *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 8, Issue 2, 2023.

- Mateusz Zaliński, “Claims of Contemporary Political Representation Theory: Debate on the Nature of Political Relationships,” *Politeja*, 3(90), 2024.
- Medya Apriliansyah, “Efektifitas Pelaksanaan Masa Reses Anggota DPR RI Periode 2014-2019 di Daerah Pemilihan Jabar IV”, *Jurnal Sekretariat & Administrasi (Serasi)*, Vol. 17, No. 1, April, 2019.
- Michael G. H., Goni, Herman Nayoan dan Daud Liando, “Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019”, *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 3, 2019.
- Muhammad Nur Ramadhan dan Jimmy Daniel Berlianto Oley, “Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal”, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Muhammad Yahya, “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 14, No. 1, Juni, 2018.
- Putera Astomo, “Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, September, 2014.
- Reni Ria Armayani Hasibuan dan Siti Aisa, “Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia”, *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. V, No. 1, 2020.
- Ronald Rogowski, “Representation in Political Theory and in Law,” *Chicago Journals*, Vol. 91, No. 3, 1981.
- Setyo Utomo, *et al.*, “Responsibilities of Regional House of Representative in Administering the Legislative Functions”, *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, Vol. 10, No. 3S, 2023.
- Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation”, *Journal of the American Planning Association*, Vol. 35, No. 4, 1969.
- Siti Hidayati, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2, Maret, 2019.
- Yutirsa Yunus dan Reza Faraby, “Reduksi Fungsi Anggaran DPR dalam Kerangka *Checks and Balances*: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 2, Agustus, 2014.

Karya Akhir

- Jamiludin, 2023, *Tesis: “Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Dihubungkan dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Jeppernando Situmorang, 2023, *Tesis: “Kekuatan Dasar Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia”*, Universitas Borneo Tarakan.

- Muhammad Rafi Aryaputra, 2022, *Skripsi: "Urgensi Pengaturan Aliran Dana Reses Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014 – 2019"* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nor Fadillah, 2022, *Tesis: "Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Negara Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara"*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Artikel Internet

- Ardito Ramadhan dan Diamanty Meiliana, "Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebih Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib," 9 Desember 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/09/14223471/jumlah-anggota-pansus-ruu-ikn-lebih-batas-dpr-bahas-perubahan-tata-tertib>, diakses 19 Maret 2025.
- Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, "Detail Berita Kunjungan Kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU ke Titik Nol IKN," 16 Januari 2022, <https://bappeda.kaltimprov.go.id/index.php/beranda/berita/kunjungan-kerja-panitia-khusus-pansus-ruu-ke-titik-nol-ikn.kunjungan-kerja-panitia-khusus-pansus-ruu-ke-titik-nol-ikn/detail?lang=id>, diakses 19 Maret 2025.
- CNN Indonesia, 2021, "DPR Bentuk Pansus RUU Ibu Kota Baru, Anggota 56 Orang", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211207155156-32-731000/dpr-bentuk-pansus-ruu-ibu-kota-baru-anggota-56-orang>, diakses 5 September 2024.
- CNN Indonesia, "Pansus RUU IKN Bungkam soal Kunker ke Kazakhstan di Tengah Kerusuhan," 6 Januari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220106112721-32-743279/pansus-ruu-ikn-bungkam-soal-kunker-ke-kazakhstan-di-tengah-kerusuhan>, diakses 16 Mei 2025.
- Database Peraturan BPK, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>, diakses 16 Maret 2025.
- _____, "Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," <https://peraturan.bpk.go.id/Details/63584>, diakses 17 Maret 2025.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 2022, "Pendapat Fraksi Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara", 18 Januari 2022, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/PANSUS-RJ-20220309-105621-9313.pdf>, diakses 8 Agustus 2024.
- _____, "Laporan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 – 2022 ke Provinsi Kalimantan Timur," <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K4-Laporan-Kunjungan-Kerja>

[Komisi-IV-DPR-RI-Reses-Masa-Persidangan-II-Tahun-Sidang-2021-2022-ke-Provinsi-Kalimantan-Timur-1641453482.pdf](#), diakses 18 Maret 2025.

- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2019, “Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Tahun 2019”, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/pidato-kenegaraan-presiden-jokowi-tahun-2019/>, diakses 7 Agustus 2024.
- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), “DPR Belum Optimal Jadi Wakil Rakyat (Evaluasi Kinerja DPR MS II TS 2021 – 2022) 1 November – 16 Desember 2021,” 7 Januari 2022, <http://formappi.com/wp-content/uploads/2022/03/EVAKIN-DPR-MS-II-TS-2021-2022-Ok.pdf#>, diakses 19 Maret 2025.
- Fraksi Partai Demokrat DPR RI, “Fraksi Demokrat: Tidak Tepat Membahas RUU IKN Saat Pandemi,” 6 September 2021, <https://fpd-dpr.com/article/read/fraksi-demokrat-tidak-tepat-membahas-ruu-ikn-saat-pandemi>, diakses 19 Maret 2025.
- Fransisca Christy Rosana, “Rancangan UU Ibu Kota Negara Rampung Dibahas Antar-Kementerian,” 26 Agustus 2021, <https://www.tempo.co/ekonomi/rancangan-uu-ibu-kota-negara-rampung-dibahas-antar-kementerian-480564>, diakses 19 Maret 2025.
- International Association for Public Participation Indonesia (IAP2)*, “Tujuh Nilai Pokok untuk Praktik Partisipasi Publik”, 13 November 2018, <https://iap2.or.id/nilai-dasar-iap2/>, diakses 11 Maret 2025.
- Iqbal Basyari dan Dian Dewi Purnamasari, “Soal Studi Banding ke Kazakhstan, DPR Sebut Pansus RUU IKN Hanya Penuhi Undangan Bappenas,” 3 Januari 2022, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/01/03/soal-studi-banding-ke-kazakhstan-dpr-sebut-pansus-ruu-ikn-hanya-penuhi-undangan-bappenas>, diakses 18 Maret 2025.
- Kurnia Yunita Rahayu, “Baleg DPR Otokritik Proses Legislasi yang Kerap Abaikan Publik”, 28 Oktober 2024, <https://www.kompas.id/artikel/baleg-dpr-otokritik-proses-legislasi-yang-kerap-abaikan-publik>, diakses 11 Maret 2025.
- Nano Tresna A., 2022, “Minim Partisipasi Masyarakat, UU IKN Minta Dinyatakan Inkonstitusional”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18141#:~:text=Pembentukan%20UU%20IKN%20yang%20dibahas,sangat%20strategis%20dan%20berdampak%20luas>, diakses 6 Maret 2024.
- Online Etymologi Dictionary, “recess,” <https://www.etymonline.com/search?q=recess>, diakses 15 Maret 2025.
- Oxford Learner’s Dictionary, “recess,” https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/recess_1?q=recess, diakses 15 Maret 2025.
- Pundarika Vidya Andika, “Mengenal Arnstein’s Ladder dalam Menata Partisipasi Publik,” *International Association for Public Participation Indonesia (IAP2)*, 11 Januari 2022, <https://iap2.or.id/mengenal-arnsteins-ladder-dalam-menata-partisipasi-publik/>, diakses 14 Maret 2025.

- Santi Dewi, “5 Anggota DPR Studi Banding IKN ke Kazakhstan Saat Kasus Omicron Naik,” 4 Januari 2022, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/5-anggota-dpr-studi-banding-ikn-ke-kazakhstan-saat-kasus-omicron-naik>, diakses 19 Maret 2025.
- Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021, “Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2021-2022”, <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Naskah-Pidato-Pidato-Ketua-DPR-RI-pada-Rapat-Paripurna-DPR-RI-Penutupan-Masa-Persidangan-II-Tahun-Sidang-2021-2022-1639637104.pdf>, diakses 8 Oktober 2024.
- _____, 2021, “RUU tentang Ibu Kota Negara, Catatan Terkait Pengaturan Pertanahan dalam RUU IKN oleh Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, S.H., MCL, MPA.”, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-042214-4178.pdf>, diakses 31 Januari 2025.
- _____, 2021, “Laporan Singkat Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara tanggal 07 Desember 2021.”, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/PANSUS-RJ-20220314-041714-7898.pdf>, diakses 7 Agustus 2024.
- _____, 2021, “Laporan Singkat Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, Audiensi dengan Forum Dayak Bersatu (FDB) tanggal 17 Desember 2021”, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/PANSUS-RJ-20220318-023629-8298.pdf>, diakses 12 Agustus 2024.
- _____, 2022, “Laporan Pansus DPR RI dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN)”, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/Paripurna-RJ-20220131-114035-7554.pdf>, diakses 19 Desember 2024.
- _____, 2022, “RUU tentang Ibu Kota Negara, Berkas Rapat Paripurna DPR RI, Laporan Pansus DPR RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN)”, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/Paripurna-RJ-20220131-114035-7554.pdf>, diakses 26 April 2024.
- _____, 2021, “Rekam Jejak RUU tentang Ibukota Negara pada Program Legislasi Nasional”, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368>, diakses 18 Januari 2025.
- _____, 2022, “DPR Setujui RUU IKN Jadi UU”, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/>, diakses 18 Maret 2024.
- _____, 2024, “Program Legislasi Nasional”, <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, diakses 8 Maret 2024.

- Senat Akademik Universitas Hasanuddin, Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua Komisi II DPR RI Periode 2019 – 2024 c.q. Ketua Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara), “Pemindahan IKN Kebijakan, Tantangan dan Perspektif Masa Depan” (Dialog Kebangsaan Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum / MDGB PTNBH, 8 Mei 2024), <https://sa.unhas.ac.id/dialog-kebangsaan-mdgb-ptnbh-tema-pemindahan-ikn-kebijakan-tantangan-dan-perspektif-masa-depan/>.
- Sidik Pramono, “Bappenas-Pansus RUU IKN DPR RI Kunjungi Titik Penting Pembangunan IKN,” 14 Januari 2024, “<https://ikn.go.id/storage/press-release/2022/siaran-pers-bappenas-pansus-ruu-ikn-dpr-ri-kunjungi-titik-penting-pembangunan-ikn.pdf>,” diakses 18 Maret 2025.
- TEMPO, “Krisdayanti Jelaskan Soal Dana Reses Anggota DPR Sebesar 1M”, 16 September 2021, <https://www.tempo.co/politik/krisdayanti-jelaskan-soal-dana-reses-anggota-dpr-sebesar-rp-1-m--473627>, diakses 24 Januari 2025.
- The House of Representatives of The Netherlands, “Frequently asked questions: When is the House in recess?”, <https://www.houseofrepresentatives.nl/contact/frequently-asked-questions>, diakses 24 Januari 2025.
- The Sidney Morning Herald, “*The Tribe in the Path of Indonesia’s ‘Almost Impossible’ New Capital*”, 15 September 2019, <https://www.smh.com.au/world/asia/the-tribe-in-the-path-of-indonesia-s-almost-impossible-new-capital-20190912-p52qu9.html>, diakses 27 Januari 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Kementerian PPN/Bappenas, “Siaran Pers Kementerian PPN/Bappenas Gelar Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara,” 16 Mei 2019, <https://ikn.go.id/storage/press-release/2019/2-siaran-pers-kementerian-ppn-bappenas-gelar-dialog-nasional-pemindahan-ibu-kota-negara.pdf>, diakses 27 Maret 2025.
- VIVA News & Insights, 2010, “SBY Kaji Pindahkan Ibukota Sejak Maret”, 3 Agustus 2010, <https://www.viva.co.id/berita/politik/168665-istana-kaji-pindahkan-ibukota-sejak-maret>, diakses 26 Desember 2024.
- Yustinus Paat, “Rapat hingga Tengah Malam dan Manfaatkan Masa Reses,” 18 Januari 2022, <https://investor.id/national/278825/rapat-hingga-tengah-malam-dan-manfaatkan-masa-reses>, diakses 18 Maret 2025.

Naskah Akademik

Kementerian PPN/Bappenas, 2021, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara.

Penelitian Lain

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2020, Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020.